



Japan International Cooperation Agency

Kajian Dasar untuk EIDP JICA tentang Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Pertanian di Indonesia Timur untuk RPJM 2010-2014



RINGKASAN EKSEKUTIF COMPOSITION 2



Mitrapacific Consulindo International

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Dasar untuk EIDP JICA tentang Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Pertanian di Indonesia Timur untuk RPJM 2010-2014

(Basic Study for JICA's EIDP on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM)

Kajian Dasar ini merupakan studi yang dilaksanakan oleh JICA bekerjasama dengan BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi (atau dengan nama lainnya) se-Sulawesi. Ringkasan eksekutif ini adalah ringkasan eksekutif final report composition-2 yang merupakan 1 bagian dari 2 bagian kajian ini secara keseluruhan. Composition-2 mengajukan komoditas-komoditas pertanian yang potensial di Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi dan peluang besar untuk dikembangkan menjadi komoditas andalan Sulawesi. Berdasarkan hasil MUSREMBANGREG se Sulawesi, berbagai komoditas telah dipilih sebagai komoditas prioritas Sulawesi. Diantaranya akan dipilih dalam kajian ini untuk diungkap lebih mendalam kemungkinan pengembangannya di Sulawesi.

Pemilihan komoditas dalam kajian ini didasarkan pada proses seleksi yang mengkombinasikan parameter-parameter ekonomi dan finansial. Parameter ekonomi mencakup: (1) economic price; (2) economic value; dan (3) pecapita economic benefit, sedangkan parameter finansial berupa profitability variable (B/C ratio). Rangkumannya adalah sebagai berikut:

Komoditas	Economic Price Index	Economic Value Index	Percapita Economic Benefit Index	B/C Ratio	Total Skor Kuantitatif
Coklat	0.61	2.97	2.93	1.68	8.19
Kelapa	0.04	0.27	0.26	0.62	1.19
Kopi	0.09	0.05	0.51	1.03	1.68
Mete	0.80	0.02	0.22	1.67	2.71
Jagung	0.09	1.41	1.41	1.82	4.73
Kentang	0.24	0.29	0.29	1.46	2.28
Tuna	1.17	0.68	0.69	1.23	3.76
Cakalang	0.30	0.60	0.59	1.72	3.21
Udang	2.95	0.86	0.83	1.50	6.15
Kerapu	4.90	0.00	0.02	3.53	8.44
Rumput Laut	0.10	0.55	0.55	0.83	2.03
Daging Sapi	1.05	1.62	1.70	1.24	5.61

Kajian ini mengharuskan composition-2 untuk memilih 5-6 komoditas saja dari sekian banyak komoditas andalan di Sulawesi dan sesuai dengan berbagai parameter dalam proses seleksi tersebut, komoditas dengan total skore tertinggi saja yang dipilih. Sedangkan, komoditas dengan skor lebih rendah yaitu kelapa, kopi, kentang, rumput laut dan mete tidak dipilih.

Akhirnya, 6 komoditas telah terpilih untuk dikaji lebih mendalam potensi dan kemungkinan pengembangannya di Sulawesi, yaitu komoditas Tuna (termasuk didalamnya cakalang), Udang Windu, Kerapu, Sapi Potong, Jagung dan Coklat.

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Tuna



Kondisi industri tuna Indonesia sangat berhubungan erat dengan dan dipengaruhi oleh kondisi pasar dunia. Issue kelestarian sumberdaya, keamanan dan kesehatan pangan yang diikuti oleh peraturan perdagangan di negara tujuan sangat berpengaruh besar terhadap ekspor Indonesia. Saat ini Indonesia termasuk dalam tujuh negara eksportir tuna terbesar dunia dan menduduki tempat ketiga setelah Taiwan dan Jepang. Jenis utama yang diperdagangkan adalah tuna sirip kuning dan mata besar. Produk utama

yang diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomis tinggi adalah tuna segar dan beku, sedangkan tuna olahan (terutama dalam kaleng) merupakan komoditas sekunder dan tidak menjadi prioritas pelaku bisnis.

Masalah terbesar dalam industri tuna Indonesia adalah; (1) terbatasnya kapal penangkap yang memenuhi persyaratan *hygiene* yang menjamin kualitas tuna; (2) Tidak konsistennya pelaku bisnis dalam hal mutu; (3) lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan degradasi sumberdaya yang akhirnya berpengaruh pada CPUE; (4) Prioritas bisnis pada tuna segar dan beku sehingga mengakibatkan rendahnya upaya untuk mengembangkan industri tuna kalengan.

Meningkatnya volume ekspor ke negara tujuan baru menunjukkan permainan pasar yang tidak jelas oleh pelaku bisnis. Pemerintah RI harus mengambil langkah tegas untuk menanggulangi dan mengantisipasi terjadinya praktik perdagangan yang bersifat ilegal dan tidak jujur. Indikasi tersebut diperlihatkan oleh terjadinya nilai ekspor yang sangat rendah untuk komoditas tuna yang diekspor ke Filipina. Praktik *dumping* yang dilakukan oleh eksportir Bitung (yang sebenarnya orang Filipina) yang ditunjukkan oleh rendahnya harga FOB sangat berbahaya dan merugikan Indonesia. Kolaborasi yang sistematis dengan berbagai stakeholder oleh Pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kehilangan devisa dan pengurasan sumberdaya.

Sulawesi Utara merupakan eksportir tuna terbesar di antara semua provinsi di Sulawesi, meskipun menunjukkan penurunan signifikan sejak 2002-2008. Penurunan tersebut diperkirakan disebabkan oleh: (1) masalah ketidak-sinkronan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data diantara dinas teknis yang bertanggungjawab sehingga mendorong terjadinya *IUU Fishing Practices*; (2) para pelaku usaha tidak melaporkan kegiatannya selama periode tersebut sehingga pemerintah tidak memiliki data aktual (bertentangan dengan sisi produksi yang menunjukkan puncaknya pada periode tersebut); (3) tuna dan cakalang kalengan merupakan komoditas utama.

Sulawesi Selatan menempati urutan kedua dalam hal ekspor tuna dengan volume yang cenderung stabil antara 1.100 sampai dengan 1.800 ton per tahun. Produk utama yang diekspor adalah tuna segar dan beku yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Utara.

Kondisi Pelabuhan Perikanan di Sulawesi

Sulawesi Utara memiliki sumberdaya tuna luar biasa yang berasal dari Samudera Pasifik, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Laut Maluku dan Laut Seram. Sarana tangkap tuna umumnya merupakan armada skala kecil dengan alat tangkap pancing ulur, sedangkan untuk cakalang umumnya armada dengan kapal berbobot besar. Perusahaan besar biasanya mengoperasikan kapal bertonase besar dengan alat tangkap *long line*.

Perusahaan yang beroperasi di Kota Bitung umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di PPS Bitung, tetapi di dermaga milik mereka sendiri. Kondisi demikian menimbulkan dilema bagi Departemen Kelautan dan Perikanan beserta dinas terkait di tingkat provinsi. Alasan yang dikemukakan pengusaha antara lain; (1) lambatnya respon petugas pelayanan di pelabuhan untuk melayani kapal yang datang; (2) dermaga terlalu kecil untuk pendaratan sehingga kegiatan bongkar muat secara simultan untuk kapal dalam jumlah banyak tidak dapat dilakukan; (3) fasilitas tambat

labuh berada di lokasi yang tidak sejajar dengan kolam labuh dan dermaga sehingga kapal memerlukan waktu dan upaya yang lebih banyak, atau waktu banyak dihabiskan untuk olah gerak kapal; (4) proses rantai dingin tidak dapat dijamin dengan akibat tiga alasan di muka sehingga pengusaha tidak mau melakukan pendaratan di PPS Bitung. Permasalahan tersebut harus secepatnya diselesaikan agar diperoleh solusi untuk mengantisipasi semakin besarnya kehilangan nilai ekonomi.

PPS Bitung harus mampu menyediakan pelayanan pelabuhan berkualitas prima dan standar internasional jika tidak ingin kehilangan manfaat ekonomi sebagai akibat larinya pengusaha ke General Santos. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap issue pemalsuan dokumen ekspor yang merugikan negara. Pemerintah harus dengan serius menanggapi dan melakukan tindakan hukum terhadap issue manipulasi jenis produk yang diekspor ke Filipina karena jika dibiarkan berlanjut akan merugikan Indonesia dari segi penerimaan devisa.

Pelabuhan perikanan lainnya secara umum belum memperlihatkan standar pelayanan, kebersihan dan kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan EU, Jepang maupun USA. Hanya sebagian kecil saja yang mampu memenuhi kriteria tersebut. Kualitas tuna yang terbaik lebih banyak dihasilkan oleh pusat pendaratan tidak resmi, sebagai contoh di Kelurahan Bontokamasse, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Issue Strategis Tuna Di Pulau Sulawesi

- Tidak tersedianya sistem transportasi untuk *agro-marine industri* dan langkanya ketersediaan tenaga listrik untuk mendukung industri tuna terpadu terutama di kawasan pusat pendaratan ikan.
- Praktek *IUU* masih berlangsung terutama dilakukan oleh nelayan asing di Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Banda dan Laut Flores.
- Terjadinya degradasi sumberdaya yang ditunjukkan oleh semakin menurunnya ukuran ikan tuna.
- Kapasitas dan kapabilitas nelayan disertai kekurangan es berpengaruh besar terhadap penanganan ikan di laut dan di pendaratan.
- Koordinasi yang lemah antara dinas perikanan dan kelautan provinsi dan kabupaten/kota.
- Kurangnya informasi praktis mengenai teknologi penanganan hasil yang lebih baik secara tepat guna disertai lemahnya penyuluhan.
- Kendala terbesar adalah es dan listrik di hampir seluruh pelabuhan perikanan.
- *Fishing ground* semakin jauh dan terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya setelah berlakunya otonomi daerah.
- Makassar tidak memiliki hubungan langsung dengan negara tujuan ekspor sehingga menimbulkan masalah dalam penanganan dan pengiriman tuna berkualitas tinggi.

Strategi Umum Tuna Sulawesi

Perlunya perubahan praktek penangkapan ikan dari kawasan perairan dekat pantai ke lokasi yang lebih jauh, dari skala besar menjadi skala kecil. Kapal penangkap ikan bertonase besar sudah harus dilarang beroperasi pada daerah yang ditentukan untuk nelayan kecil. Harus diingat, penangkapan tuna dengan sarana tangkap kecil lebih memberikan manfaat secara teknis dan ekonomis. Manfaat perubahan strategi tersebut adalah; (1) secara teknis dihasilkan kualitas tuna yang lebih baik; (2) secara ekonomis memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi keluarga nelayan dan jaminan kelestarian sumberdaya dalam jangka panjang; dan (3) mencegah konflik akibat tumpang tindih kepentingan.

Penegakan hukum yang lebih represif diperlukan untuk mencegah beroperasinya nelayan asing. Pemerintah nasional harus menyusun kerangka hukum dan aturan yang lebih tegas disertai metode penegakannya, dan kalau perlu menghentikan seluruh operasi kapal asing di perairan Indonesia.

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Pemerintah Pusat harus mampu mendorong Bank Indonesia untuk lebih berperan dalam pembangunan sektor perikanan dengan membuat aturan bagi Bank Komersial untuk memberikan keleluasaan dan akses yang besar bagi pelaku usaha perikanan dalam hal permodalan. Diperlukan peraturan dan perundangan yang lebih memihak kepada nelayan dalam memperoleh pelayanan finansial. Akses ke permodalan sangat penting untuk memberdayakan nelayan skala kecil sebagai ujung tombak produksi sehingga mereka mampu menghasilkan tuna berkualitas sesuai standar kualitas yang diinginkan pasar. Oleh karena itu kebijakan BI harus ditinjau ulang dan harus memiliki keberpihakan yang lebih besar terhadap sektor perikanan misalnya dengan merubah persyaratan kredit dan kolateral.

Rekomendasi Program Umum Untuk Pulau Sulawesi

- Sistem transportasi terintegrasi dan kelistrikan untuk meningkatkan dampak dan manfaat ekonomi insutri berbasis *agro-marine*.
- Studi komprehensif untuk meningkatkan peran PPS Bitung.
- Perbaiki pusat pendaratan ikan untuk industri tuna beserta fasilitas pokok dan fungsional.
- Pembangunan pusat pengolahan *loin* skala kecil di beberapa sentra pendaratan yang sudah ada dilengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria kesehatan dan keamanan pangan.
- Penguatan MCS untuk memperkuat manajemen sumberdaya tuna untuk mencegah degradasi sumberdaya melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan proses penegakan hukumnya.
- Penguatan manajemen sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum.
- Penguatan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada.
- Pulau Sulawesi harus membangun program dan komisi manajemen sumberdaya perikanan antar pemerintah provinsi.

Rekomendasi Program dan Kegiatan Sulawesi Utara

Program	Kegiatan
Perbaiki penanganan tuna melalui pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan	 Penyediaan pabrik es di sekitar pusat pendaratan ikan
	 Penyediaan sarana prasarana air bersih untuk mendukung manajemen sanitasi dan kesehatan pusat pendaratan ikan
	 Penyesuaian sarana prasarana kelistrikan dalam jangka panjang dan pembangunan mikro hidro untuk jangka pendek di lokasi yang tersedia sumberdaya air
	 Pemanfaatan kembali dan perbaikan pusat pendaratan ikan yang tersedia
Perbaiki kualitas <i>loin</i> tuna melalui pembangunan pusat pengolahan <i>loin</i> skala kecil	a. Pembangunan pusat pengolahan <i>loin</i> skala kecil (FS, SID, dan <i>Detailed design</i>)
	b. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan yang dibutuhkan untuk pengolahan <i>loin</i> skala kecil yang memenuhi syarat higienis, kesehatan dan keamanan pangan
	c. Membangun gedung permanen di sekitar pusat pendaratan ikan yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk produksi tuna segar berkualitas tinggi. Kanopi diwajibkan untuk melindungi tuna segar dari ekspose sinar matahari
	d. Membangun fasilitas dan infrastruktur transportasi yang memenuhi syarat sistem rantai dingin
Perbaiki kecakapan penanganan paska panen	a. Pelatihan praktis dan berkelanjutan pengembangan teknologi penanganan di pelabuhan

Program	Kegiatan
untuk nelayan	<ul style="list-style-type: none"> b. Pelatihan berkelanjutan teknologi manajemen bisnis dan pengolahan tuna berorientasi pasar ekspor c. Menyediakan praktek dan pengetahuan mengenai tuna berkelas dunia
Membangun kemitraan pengolahan <i>loin</i> dan kerangka kerjasama operasi saling menguntungkan antara pelaku usaha skala kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan manajemen bisnis berbasis kemitraan • Penyediaan akses kredit dan bantuan manajemen untuk membangun kapasitas kewirausahaan dan pembentukan modal mandiri • Melalui kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan menyediakan bantuan financial dalam bentuk paket kredit murah dan mudah untuk pengolah <i>loin</i> skala kecil
Rehabilitasi PPI Kalijengki	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi kawasan pelabuhan, restrukturisasi dan penataan kembali kondisi pelabuhan yang tidak terurus dan kumuh • Penyediaan <i>cold storage</i> dan <i>chiller</i>
Program untuk pemberdayaan nelayan dan perbaikan pelabuhan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan PPI Bobongo (Minahasa Selatan) yang terbengkalai dan tidak terurus • Pemanfaatan kembali dan rehabilitasi PP Dudepo disertai peningkatan status; keadaan sekarang tidak jelas statusnya apakah PPI atau PPP, dilihat dari produksi pendaratan ril sudah pantas menjadi PPP • Penyediaan sistem distribusi bahan bakar untuk nelayan yang lebih berkeadilan dengan harga yang rasional di beberapa pelabuhan perikanan terutama yang jauh dari jangkauan • Penyediaan fasilitas air bersih terutama di Tumumpa dan Dudepo • Perbaikan manajemen pelabuhan di PPP Tumumpa

Rekomendasi Program dan Kegiatan Sulawesi Selatan

- Penyediaan tenaga listrik di beberapa pendaratan ikan tradisional yang beroperasi melebihi kapasitas tetapi listrik tidak memadai di Kabupaten Bulukumba, Sinjai dan Bone.
- Pembangunan pelabuhan alam di Kelurahan Bontokamasse dengan kegiatan sebagai berikut: (1) Fasilitas pokok berupa: Pembebasan tanah untuk kawasan pelabuhan; *Jetty/wharf* atau *landing pier*; Dermaga bongkar ikan; Jalan kompleks pelabuhan; *Breakwater*; dan *Causeway*. (2) Fasilitas fungsional yang mendesak untuk disediakan/dibangun berupa: Jaringan listrik dan penerangan; Gedung tempat pelelangan ikan; Toilet umum/MCK; Penyediaan sarana penyimpanan air bersih/menara air; Gudang es; Balai pertemuan nelayan; Pagar keliling pelabuhan; Pabrik es skala 10 ton per hari; Tanki BBM dan atau penyediaan BBM/stasiun BBM; Kantor pelabuhan, bengkel dan pelataran pelabuhan. (3) Pembangunan fasilitas penunjang berupa: Kios serba ada; Sarana dan prasarana ibadah; Pos jaga dan pintu gerbang.
- Penambahan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk PPI Lappa berupa perluasan areal pelabuhan (yang ada hanya seluas dua hektar), untuk menampung seluruh aktivitas pendukung kegiatan pendaratan, penyimpanan dan distribusi hasil tangkapan, untuk lahan parkir, pembangunan *cold storage* (yang tersedia hanya berkapasitas 5 ton, jika musim penangkapan ikan tiba, kapasitas sebesar itu tidak mencukupi), pembangunan *airblast freezer* dan atau *brain freezer* sebagai prasarana pelengkap untuk mempertahankan mutu ikan, pembangunan pabrik es curah dan penambahan tanki BBM.
- Percontohan agribisnis terpadu melalui sistem pemasaran yang terpadu dengan proses lelang dan tatanan sistem informasi berdasarkan kapasitas dan kondisi sumberdaya perikanan.
- Penyelesaian PPI Lonrae di Kabupaten Bone dan penyusunan program pemusatan pendaratan tuna di tiga kabupaten (Bulukumba, Sinjai dan Bone) untuk mendukung pasokan bahan baku industri tuna di KIMA (Kawasan Industri Makassar).

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Rekomendasi Program dan Kegiatan Sulawesi Tenggara

- Pembangunan dan atau rehabilitasi infrastruktur transportasi Pulau Buton.
- Peningkatan kualitas jalan, terutama ruas Pasar Wajo ke Kota Bau-Bau sepanjang \pm 49 km dan antara sentra-sentra pendaratan nelayan di sekitar Pasar Wajo dan Kamuru ke sentra pengolahan *loin* yang akan dibangun.
- Membangun unit-unit pengolahan *loin* skala kecil di sekitar pusat pendaratan di Pulau Buton (Kabupaten Buton dan Buton Utara), yang tersebar di Kecamatan Pasar Wajo, Kamaru, dan Ereke. Membangun sentra penyimpanan dan ruang pendingin yang dilengkapi dengan fasilitas pengemasan di ketiga lokasi tersebut.
- Membangun ketersediaan energi listrik oleh PT. PLN untuk mendukung pengembangan sentra proses *loin*.
- Apabila PT. PLN tidak mampu menjamin ketersediaan listrik dalam jangka panjang maka perlu adanya upaya penyediaan energi alternatif dalam bentuk: PLTBayu (pembangkit listrik tenaga angin) atau PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hidro).
- Melakukan penataan ulang sistem distribusi dan pengangkutan tuna *loin* di darat dan laut dengan menyediakan sarana transportasi yang memenuhi syarat untuk mempertahankan mutu ikan yang telah diproses menjadi *loin* dalam bentuk kapal cepat yang dipadukan dengan transportasi di daratan.
- Mengkaji kemungkinan dan kelayakan pengangkutan tuna *loin* secara langsung melalui udara dari Pulau Buton ke Jakarta atau Denpasar. Analisis finansial dan teknis untuk menguji layak atau tidaknya penerbangan langsung antara Pulau Buton ke Denpasar dan atau Jakarta, dengan kegiatan: (1) Analisis kelayakan teknis pembangunan/pelebaran bandar udara yang tersedia di Pulau Buton; (2) Analisis kemungkinan pengembangan jaringan transportasi udara antara Pulau Buton dengan Makassar sebagai alternatif, jika tidak memungkinkan untuk membangun sistem transportasi udara antara Pulau Buton dengan Jakarta dan atau Denpasar; (3) Melakukan kajian komprehensif mengenai perubahan sistem distribusi, penyediaan bahan baku dan bahan penolong, penyediaan energi listrik; dan ketersediaan bahan bakar.
- Melakukan kegiatan sosialisasi, *social preparation* dan *need assessment* bagi semua pelaku usaha perikanan tangkap tuna skala kecil sebagai persiapan untuk menyusun rencana rinci pembangunan sentra industri *loin* untuk menghasilkan tuna segar dengan kualitas dan *grade* yang sesuai dengan pasar EU.

Udang Windu



udang windu adalah salah satu komoditas ekspor primadona Indonesia.

Udang windu merupakan spesies yang paling banyak dibudidayakan di Sulawesi diantara berbagai jenis spesies udang lainnya. Jenis udang ini dapat secara masal dibudidayakan baik dengan pola intensif maupun tradisional di pertambakan masyarakat di Sulawesi dengan kuantitas yang sangat besar. Disamping itu, permintaan udang ini di pasar internasional selalu terbuka dan dapat terus meningkatkan devisa secara berkelanjutan. Sebagaimana telah diketahui, udang

windu adalah salah satu komoditas ekspor primadona Indonesia. Tambak air payau (pertambakan) sudah berkembang di hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi yang memiliki wilayah pantai yang landai. Sulawesi memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan pertambakan untuk budidaya udang windu. Diantara 6 provinsi di Sulawesi, Sulawesi Selatan adalah provinsi penghasil utama perikanan tambak dan memiliki pertambakan

dengan area terluas. Total produksi perikanan tambak di Sulawesi Selatan pada tahun 2008, mencapai lebih dari 270 ribu ton yang terdiri dari berbagai macam komoditas perikanan.

Total produksi udang Sulawesi pada tahun 2006 mencapai 41.470 ton. Kontribusi terbesar dalam produksi udang ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang memproduksi lebih dari 46%, diikuti Sulawesi Barat (23%) dan Sulawesi Tenggara (16%). Secara keseluruhan, Sulawesi memberikan kontribusi produksi udang yang cukup signifikan terhadap produksi nasional. Rata-rata kontribusi produksi udang regional Sulawesi mencapai lebih dari 10%, bahkan pada tahun 2003 mencapai lebih dari 15%.

Pada tahun 2007, udang windu yang diproduksi dari pertambakan di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 77% total produksi seluruh jenis udang yang dibudidayakan. Produksi budidaya udang windu Sulawesi Selatan ini berkontribusi lebih dari 9,4% dari total produksi udang windu nasional dari seluruh pertambakan di Indonesia. Bahkan pada tahun 2005, produksi udang windu Sulawesi Selatan mencapai 15,31% dari total produksi udang windu nasional, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu produsen udang windu utama di Indonesia.

Total produksi udang windu dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2008 adalah sebesar 11.263 ton *equal* 63,5% total produksi untuk semua jenis udang. Sedangkan total produksi semua jenis udang di Sulawesi Selatan adalah 17.733 ton *equal* 6,55% total produksi semua komoditas budidaya di Sulawesi Selatan.

Hanya saja, budidaya udang windu menghadapi masalah serius khususnya terjadi di tambak-tambak masyarakat. Demikian juga di Sulawesi (seperti halnya juga banyak terjadi di wilayah lainnya di Indonesia), budidaya udang di tambak-tambak masyarakat terhambat oleh berjangkitnya berbagai jenis penyakit seperti insang merah, udang keropos, bintik putih/*white spot* dll. Diantara berbagai jenis penyakit tersebut, *white spot* (WSSV/*white spot syndrome virus*) merupakan penyakit yang paling dominan dan dianggap paling merugikan bagi masyarakat.

Permasalahan penyakit yang menyerang udang windu ini tidak lepas dari permasalahan buruknya manajemen lingkungan pertambakan serta semangat memproduksi udang sebanyak-banyaknya yang tidak diimbangi dengan kontrol memadai terhadap pola budidaya. Padahal, di berbagai pertambakan yang intensif sekalipun di Indonesia yang memiliki lingkungan yang baik dan menerapkan manajemen lingkungan serta kontrol pola budidaya yang baik, mampu menghindari permasalahan penyakit ini dan terus memproduksi udang windu dalam volume yang besar.

Disisi lain, ketidaksiapan teknologi dalam mengatasi permasalahan penyakit (termasuk didalamnya upaya dalam menghasilkan benur yang unggul) juga menyebabkan *recovery* budidaya udang di pertambakan masyarakat ini menjadi lambat dan tidak tuntas.

Secara umum, baik masalah pertambakan maupun masalah budidaya udang di Sulawesi membutuhkan penanganan pemecahan masalah dalam pengembangannya, agar mampu memproduksi udang dengan volume yang lebih besar secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan dunia yang terus tumbuh.

Keberhasilan pengembangan udang windu ini kedepan termasuk didalam penanganan penyakit, akan membangkitkan kembali budidaya udang sebagai primadona komoditas perikanan bagi masyarakat pertambakan nasional, yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk pengembangan berbagai jenis udang lainnya. Walaupun upaya Pemerintah sudah ada melalui berbagai *research* dan bantuan, tetapi hingga kini belum dapat diimplementasikan secara memadai. Pengembangan udang di Sulawesi jelas sangat strategis tetapi membutuhkan langkah-langkah kemungkinan pengembangan yang strategis juga.

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Rekomendasi Program dan Kegiatan (Strategi dalam Pengembangan Budidaya Udang Windu di Sulawesi)

Sulawesi memiliki BKPRS (Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi) yang mengakomodasi pembangunan di Sulawesi sebagai satu wilayah. BKPRS adalah sebuah pendekatan yang sangat bagus dari semua provinsi di Sulawesi untuk sinergi, kerjasama dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi. Pengembangan udang windu di Sulawesi juga harus masuk dalam program pembangunan di BKPRS.

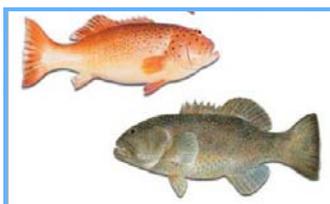
Untuk pengembangan udang windu di Sulawesi, rekomendasi langkah strategis yang harus diambil dan dijalankan adalah:

- Pengembangan Pertambakan (Restrukturisasi dan Revitalisasi Area Pertambakan Potensial di Sulawesi), yang mencakup:
 - *Expandable Brackish-water Area* untuk Tambak. Pengembangan perluasan area pertambakan ini direkomendasikan hanya untuk kabupaten yang terkategori rendah pemanfaatan area potensialnya. Walaupun banyak daerah termasuk dalam kategori rendah tersebut, tetapi pengembangannya tidak direkomendasikan untuk pembangunan jangka dekat hingga menengah (untuk jangka panjang saja).
 - Restrukturisasi dan Revitalisasi Pertambakan yang sudah ada. Restrukturisasi dan revitalisasi ini sangat penting dan sangat direkomendasikan. Konsep dan pelaksanaannya harus sesuai dengan konsep CBIB. Untuk pembangunan jangka pendek dan menengah, restrukturisasi dan revitalisasi pertambakan ini dapat difokuskan terlebih dahulu di daerah utama penghasil udang dan daerah dengan tingkat pemanfaatan area potensial tambaknya yang sudah sangat tinggi.
- Pengembangan Teknologi Produksi yang Berkelanjutan. Untuk menggairahkan produksi udang, permasalahan pokok dalam budidaya udang berupa penyakit harus dapat dikendalikan. Upaya dalam menanggulangi masalah penyakit pada udang ini dilakukan melalui 2 pendekatan yang harus dapat direalisasikan:
 - Secara vertikal, dengan: 1) Revitalisasi hatchery agar menghasilkan benur standar yang berkualitas baik, 2) Sertifikasi benur yang disebar dan 3) *Research* untuk menghasilkan bibit udang windu yang tahan penyakit dan teknik penanganan penyakit, pengendalian dan pengobatannya.
 - Secara horizontal, dengan: 1) Penataan ruang pertambakan berorientasi '*sustainable production*', 2) Rehabilitasi tambak yang rusak dan terbengkalai serta menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), 3) Peningkatan sumberdaya manusia dengan penyuluhan yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran (APBD) untuk merealisasikannya, 4) Penyediaan sarana produksi yang lebih mudah didapat, tepat waktu, dan murah, 5) Dukungan kelembagaan secara merata ke seluruh sentra dan revitalisasi kelembagaan yang sudah ada, 6) Revitalisasi sumberdaya perairan, 7) *Research and development* secara terus-menerus sesuai kebutuhan dan fakta pertambakan yang berkembang melalui balai-balai dan berbagai institusi terkait lainnya..
- Reformasi Skema Pendanaan. Dalam pembangunan pertanian untuk small scale business, reformasi skema pendanaan ini harus dilakukan dengan tidak menyama-ratakan resiko bisnisnya.
- Infrastruktur Dasar, Fasilitas Pendukung dan Pengembangan Ketenagakerjaan. Berbagai infrastuktur dasar dan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, bandara, transportasi, *hatchery* (dalam jumlahnya), unit pengolahan/*cold storage*, pabrik es, laboratorium, dll. secara keseluruhan telah dapat mengakomodasi produksi dan berbagai kegiatan budidaya udang di

tambak hingga diekspor. Walaupun demikian untuk masa mendatang (jangka panjang), saat arus transportasi butuh lebih cepat dan dengan volume produk yang lebih besar, maka jalan, infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung tersebut diatas pasti membutuhkan peningkatan. Terkait dengan infrastruktur dasar, fasilitas pendukung dan pengembangan ketenagakerjaan, rekomendasi langkah pengembangannya adalah:

- Pengembangan *hatchery* (Standarisasi dan Sertifikasi). Standarisasi maupun sertifikasi *hatchery* merupakan peran pemerintah. Revitalisasi dan standarisasi *hatchery* adalah melalui GMP sedangkan Sertifikasi dan seleksi operasional *hatchery* adalah melalui SOP dan SSOP.
- Penyediaan (pembangunan) balai atau sub balai atau laboratorium khusus yang menangani R&D udang windu secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan permasalahan faktual yang dihadapi, termasuk didalamnya aspek pemasaran dan distribusi. Institusi khusus ini akan terus-menerus mendampingi petambak udang windu dalam pengembangan teknologi dan manajemen budidaya berdasarkan apa yang dihadapi dan dibutuhkan petambak. R&D khusus udang windu ini sangat direkomendasikan dan dapat ditempatkan di Pinrang, Sulawesi Selatan (sebagai prioritas pertama). Pinrang adalah kabupaten penghasil udang terbesar di Sulawesi.
- R&D itu juga harus dilengkapi dengan percontohan/demplot (*demonstration plot*) pembudidayaan udang windu yang mewakili kondisi pertambakan di Sulawesi, khususnya pertambakan tradisional sebagai rujukan bagi semua petambak udang. Demplot-demplot ini harus dibangun di sentra-sentra utama pertambakan udang, sebagai unit produksi sekaligus percontohan dan harus di-set dan dikelola sesuai dengan konsep CBIB dan ditangani oleh tenaga-tenaga profesional. Semuanya dapat dikembangkan melalui kerjasama pembangunan dengan pihak ke-3 (swasta via PPP maupun donor).
- Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui Penyuluhan. Sosialisasi dan pendampingan merupakan salah satu kunci keberhasilan semua langkah-langkah strategis diatas.
- Reformasi Dunia Pendidikan Perikanan. SMK Perikanan yang sudah ada dan perguruan tinggi belum menghasilkan tenaga perikanan yang memadai *performance*-nya dalam mendukung pembangunan perikanan termasuk didalamnya budidaya udang di Sulawesi. Reformasi ini dilakukan melalui: 1) Restrukturisasi institusi pendidikan; yang harus dilakukan agar lebih sesuai kebutuhan 2) Penyesuaian kurikulum yang memadai; kombinasi pendidikan lapangan dan teknologi dasar serta pengembangan teknologi terapan yang efektif dan mutakhir dibutuhkan untuk menghasilkan tenaga kerja perikanan yang trampil dan siap terjun ke fakta bisnis perikanan yang sudah berkembang di Sulawesi. Reformasi ini harus dilakukan untuk semua institusi pendidikan terkait di Sulawesi yang membutuhkannya.

Kerapu



Produksi kerapu budidaya di Sulawesi menyumbang 16% produksi nasional pada tahun 2007. Ada kecenderungan kenaikan produksi kerapu budidaya di Sulawesi. Demikian pula, kerapu hasil penangkapan di Sulawesi menyumbang 17% produksi nasional pada tahun 2007.

Kebutuhan kerapu, khususnya kerapu hidup, di pasar dunia, terutama di Hong Kong, sangat tinggi dan tidak mampu dipenuhi. Ikan karang hidup, termasuk kerapu, diekspor langsung dari Sulawesi ke Hong Kong. Apabila

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

berjumlah lebih dari satu ton setiap kali ekspor, kerapu hidup dikirim dengan kapal pengangkut ikan. Namun demikian, kerapu hidup yang berjumlah kurang dari satu ton setiap kali ekspor dikirim dengan pesawat terbang dari Manado. Ada beberapa buah kapal pengangkut kerapu hidup yang beroperasi di Sulawesi yang kesemuanya berasal dari Hong Kong. Pangkalannya berada di Kendari dan Bau-bau (Sulawesi Tenggara).

Rantai pemasaran kerapu tangkapan tergolong pendek. Ada tiga rantai pemasaran utama kerapu tangkapan dan enam rantai pemasaran utama kerapu budidaya. Semua kerapu budidaya, terutama kerapu bebek dan kerapu macan, ditujukan untuk diekspor dalam keadaan hidup. Harga kerapu hidup pada tingkat nelayan/pembudidaya sangat tinggi. Harga ekspor kerapu bebek hidup tertinggi diantara hasil-hasil laut, kecuali jika dibandingkan dengan ikan Napoleon hidup. Jika kerapu mati, maka harganya anjlok. Margin absolut diantara mata rantai pemasaran beragam dari tinggi hingga sangat tinggi. Margin absolut sangat tinggi terdapat pada jenis ikan kerapu yang kurang pasokannya dan margin absolut agak rendah terdapat pada jenis kerapu yang banyak pasokannya.

Keadaan alam di Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya sesuai untuk budidaya kerapu. Ada 2.500 buah pulau kecil di Sulawesi, terutama tersebar di Sulawesi Utara, Tengah, dan Tenggara. Seluas 1.419 ha kawasan berpotensi untuk budidaya kerapu menurut Master Plan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut. Disamping itu, ikan rucah lebih mudah diperoleh dan lebih murah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Lagi pula, jejaring pemasaran dari kawasan budidaya laut sampai dengan eksportir telah mapan.

Kebijakan Pemerintah Nasional maupun Provinsi-Provinsi di Sulawesi dalam pengembangan perikanan secara umum ialah revitalisasi perikanan dengan mengintensifkan perikanan tangkap (tetapi dengan mengendalikan kelestarian ikan) dan dengan mengintensifkan perikanan budidaya. Budidaya kerapu dengan menggunakan benih yang berasal dari balai benih berperan penting dalam mengurangi tekanan terhadap kerusakan terumbu karang. Balai benih swasta merupakan usaha khas yang memungkinkan untuk dibangun di banyak tempat guna memenuhi kekurangan pasokan benih.

Benih dan telur kerapu perlu diimpor dari tempat yang jauh. Akibatnya, 90% produksi kerapu di Sulawesi berasal dari penangkapan yang kemudian dibesarkan di karamba.

Kelompok pembudidaya kerapu rakyat memiliki keterbatasan teknologi budidaya sedangkan penyuluhan mengenai budidaya laut tidak memadai. Oleh karena kurangnya penyuluhan pada waktu ini, informasi mengenai peraturan terbaru tidak diketahui oleh pembudidaya ikan dan teknik budidaya laut yang tepat tidak disebarluaskan kepada pembudidaya ikan. Di beberapa tempat, kerja kelompok cukup sulit dan anggota masyarakat cenderung individualis. Penguatan kelompok pembudidaya merupakan hal yang perlu diutamakan dalam penyuluhan. Tidak semua kecamatan memiliki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Pada pihak lain, lembaga penyuluhan, termasuk perikanan, sedang dibenahi.

Hambatan utama dalam membudidayakan kerapu ialah masih tingginya tingkat kematian. Pemeliharaan kerapu menuntut perhatian dan ketekunan dari pembudidaya, terutama dalam mengantisipasi perubahan lingkungan perairan. Dengan demikian, tingkat hidup kerapu (SR) sangat terkait dengan prasyarat dalam pemeliharaan kerapu dan intensitas penyuluhan. Sejak menebar benih ke dalam karamba hingga panen, SR tertinggi rata-rata berkisar 50% pada kerapu bebek dan 80% pada kerapu macan. Dengan penyuluhan dan peningkatan kemampuan pembudidaya, maka SR ini pasti akan bisa ditingkatkan.

Bagaimanapun harga kerapu sangat tinggi, sehingga dengan pengelolaan yang memadai akan memberikan hasil yang menguntungkan. Karenanya, Pemerintah Pusat pun telah memberi perhatian pada pengembangan budidaya kerapu di Sulawesi selama bertahun-tahun. Banyak penelitian telah dilakukan. Pemerintah-Pemerintah Daerah juga telah memberikan paket budidaya

kerapu kepada kelompok-kelompok pembudidaya guna merangsang pengembangan budidaya kerapu di daerah masing-masing.

Dari sisi penyediaan infrastuktur, sebagian ruas jalan dari kawasan budidaya atau pembesaran kerapu dan balai benih (termasuk balai benih swasta) masih memerlukan perbaikan. Sedangkan, perhubungan laut dari kawasan budidaya atau pembesaran kerapu dan balai benih (termasuk balai benih swasta), untuk perdagangan antar pulau, dan ekspor dianggap memadai. Perhubungan udara juga memadai.

Sebagian nelayan kecil masih menangkap ikan karang, termasuk kerapu, dengan memakai sianida atau bom. Akibatnya, berbagai jenis ikan lain mati dan terumbu karang rusak. Dua puluh dari 162 jenis kerapu telah dinyatakan oleh *International Union for Conservation of Nature/Perhimpunan Konservasi Alam Internasional (IUCN)* sebagai terancam punah dalam 'Daftar Merah'nya. Jika kerapu sebagai predator tertinggi punah, berbagai jenis ikan pemakan karang lain akan menjadi dominan. Keadaan ini akan berbahaya bagi kehidupan terumbu karang yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan karang. Sebagai akibatnya, ratusan ribu nelayan akan ikut terancam mata pencariannya.

Statistik ekspor kerapu dari Sulawesi Tenggara, Selatan, dan Utara menunjukkan kecenderungan menurun selama kurun waktu 2006 hingga 2009. Alasannya mencakup: (a) kerusakan habitat, (b) penangkapan kerapu dewasa secara berlebihan, dan (c) penangkapan kerapu yuwana secara berlebihan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mendorong produksi benih dan telur kerapu di Sulawesi dengan cara: (a) mendorong masing-masing Pemerintah Provinsi untuk segera menghidupkan kembali BBIP masing-masing guna menghasilkan benih kerapu; (b) meminta balai benih/balai penelitian untuk memberi bimbingan kepada balai benih swasta guna menghasilkan benih bermutu dan menambah benih yang dihasilkan oleh BBIP dalam waktu dekat; (c) memberi kemudahan kepada balai benih swasta yang memerlukan modal dan teknologi tinggi; (d) mempertimbangkan kembali ekspor benih kerapu karena Indonesia sendiri masih mengalami kekurangan benih kerapu; dan (e) membangun Balai Budidaya Kerapu yang belum ada di negeri ini dengan Sulawesi Tenggara dianggap sebagai tempat yang strategis.

Pemerintah-Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat perlu mengatasi penangkapan ikan yang merusak dengan cara: (a) penegakan hukum terhadap perusakan sumberdaya ikan; (b) pelarangan terhadap penangkapan kerapu selama musim pemijahan; (c) pelarangan terhadap penangkapan kerapu di daerah pemijahan; (d) melaksanakan pengawasan terhadap penangkapan kerapu maupun pendataan di sentra produksi kerapu, yaitu di tempat-tempat pendaratan hasil tangkapan kerapu; (e) pengawasan atas penangkapan jenis-jenis kerapu yang terancam punah; dan (f) penebaran benih ikan karang, termasuk kerapu.

Pemerintah-Pemerintah Daerah perlu memperkuat pengembangan budidaya kerapu dengan cara: (a) melanjutkan pemberian paket bantuan kepada kelompok-kelompok pembudidaya kerapu yang disertai dengan bantuan teknis dari penyuluh dan balai benih/balai penelitian hingga panen; dan (b) memfasilitasi akses ke bank yang memiliki skim pinjaman bagi usaha kecil.

Pemerintah-Pemerintah Daerah perlu melaksanakan "pewilayahan komoditas" yang disertai dengan penerbitan peraturan-peraturan pendukungnya. Mereka juga perlu mengutamakan pengembangan sentra produksi kerapu di daerah yang berpotensi yang tersebar luas. Namun demikian, untuk pewilayahan pengembangan kerapu tersebut, tolok ukur yang dipakai sebaiknya ialah: letak pembudidaya kerapu skala besar (atau perusahaan), letak pembudidaya kerapu rakyat yang ada yang tanpa menerima bantuan dari pemerintah (kelompok pembudidaya yang mandiri), di sekitar balai benih (jika ada), teluk dengan dasar laut berkarang dan pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh terumbu karang.

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Sapi Potong



Konsumsi perkapita daging Indonesia termasuk terendah (8 kg per tahun) dibandingkan Negara tetangga (Malaysia, Thailand, Vietnam, Birma dan Philippina). Konsumsi tersebut berpotensi meningkat seiring meningkatnya PDB serta kebutuhan protein masyarakat. Akan tetapi peningkatan kebutuhan daging tersebut (khususnya sapi lebih besar dari 4% per tahun) tidak diimbangi dengan peningkatan populasi sapi (2,5% per tahun). Hal tersebut mendorong ketergantungan yang

besar terhadap impor daging maupun sapi (dalam 2003-2008 impor sapi meningkat 18% per tahun dan daging serta jeroan 14,5% per tahun).

Industri peternakan sapi potong diartikan sebagai kegiatan agribisnis yang rantai kegiatannya tidak terbatas pada kegiatan budidaya saja namun sampai kegiatan industri berikut semua kegiatan pendukungnya. Jenis ternak sapi yang banyak dipelihara di pulau Sulawesi adalah Sapi Bali, disamping Sapi Ongole dan Sapi Peranakan Ongole (PO) dalam jumlah yang lebih sedikit. Sapi Bali yang paling banyak dipelihara, karena cukup intensif berkembangbiaknya, daya tahan terhadap penyakit yang lebih baik serta ratio daging terhadap berat tubuh yang ekonomis.

Berdasarkan data yang ada, populasi sapi di Sulawesi pada tahun 2008, berjumlah 1.575.448 ekor, yang sebarannya, terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan (44,7%), disusul dengan Provinsi Sulawesi Tengah (13,0%), Sulawesi Tenggara (14,4%), Gorontalo (14,4%), Sulawesi Utara (7,0%) dan Sulawesi Barat (6,6%).

Usaha peternakan sapi potong di Sulawesi masih didominasi oleh usaha rumah tangga yang dikelola secara sederhana dengan skala usaha relative kecil (memelihara sapi potong antara 2 - 4 ekor per keluarga) dan masih merupakan usaha sampingan yang lebih bermotif sebagai tabungan, bukan sebagai komoditi perdagangan (bisnis) yang menghasilkan daging.

Performance sapi Bali di Sulawesi sudah sangat menurun, di era tahun 1970-an pada umur 18 bulan, sapi bibit memiliki tinggi pundak 114 cm dan melahirkan pertama kali di umur 29 bulan dengan berat anak lahir (pedet) maksimal 18 Kg. Pada 39 tahun kemudian (2009), tinggi pundaknya maksimal 100 cm, dan melahirkan pertama kali di umur 42 bulan dengan berat pedet rata-rata hanya 12 Kg.

Tingkat reproduksi Sapi Bali berada di bawah tingkat mutu yang memadai untuk perbanyak, karena usaha pengembang-biakan yang ada tidak didukung teknologi budidaya dan pakan yang memadai. Selain itu cukup banyak sapi betina (bibit) yang masih produktif yang dijual untuk dipotong. Dari mekanisme pasar saat ini, usaha pembibitan sapi potong tidak menarik bagi petani, karena pasar tidak memberikan insentif yang memadai. Petani peternak hanya akan menginvestasikan waktu mereka di peternakan jika alternatif dibidang usaha pertanian lain tidak tersedia.

Saluran pasar untuk sapi potong yang penuh sesak dengan sejumlah besar pedagang ternak. Pedagang atau makelar mempunyai fungsi penting, namun biaya mereka berkontribusi untuk menurunkan harga bagi produsen/peternak. Dan juga biaya pemasaran yang terjadi lebih besar daripada keuntungan pada setiap tingkat dalam rantai pasokan bisnis sapi potong.

Biaya terbesar dari biaya pemasaran adalah biaya transportasi, khususnya perdagangan antar pulau yang biaya transportasi tinggi, karena tidak efisien, seperti tidak tersedianya kapal laut khusus mengangkut sapi serta tidak terjadwal.

Pemerintah Indonesia telah membangun RPH yang cukup modern di beberapa provinsi yang dibantu oleh Pemerintah Jepang, tetapi banyak RPH tersebut penggunaannya tidak efektif seperti

RPH yang dibangun di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengelolaan dan kepemilikan RPH bisa dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah, ini menandakan bahwa usaha jasa pemotongan sapi sangat kompetitif. Pada umumnya RPH yang dibangun tidak dilengkapi fasilitas pendingin, berfungsi sebagai alat potong saja, sehingga produk daging harus habis didistribusikan dalam waktu 12 jam. Sayangnya usaha RPH tersebut tidak dikaitkan dengan pengembangan industri, karena lebih untuk melayani konsumsi domestik. Dengan demikian Sulawesi tidak bisa memperoleh nilai tambah dari produk Industrinya.

Untuk kegiatan penambahan sapi bibit, Pemerintah menyediakan sapi bibit yang akan disebar kepada petani-peternak melalui kelompoknya dengan persyaratan tertentu, seperti setiap anggota kelompok (1 KK) menerima 2 ekor bibit sapi dan mempunyai kewajiban mengembalikan sebanyak 2 ekor bibit dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu pada tahun ketiga mengembalikan 1 ekor bibit dan pada tahun kelima mengembalikan 1 ekor bibit lagi.

Potensi pengembangan

Daya saing Sulawesi secara Nasional dalam meningkatkan populasi dan kualitas ternak sapi potong cukup besar jika dilihat dari beberapa hal berikut ini:

- Potensi Sumber daya alam di Sulawesi. Sulawesi memiliki sumber daya lahan dan kesesuaian untuk budidaya ternak, seperti lahan padang rumput yang cukup luas dan produksi jagung yang tinggi sebagai bahan baku pakan ternak. Belum lagi sebagai produser kakao dunia ketiga terbesar, yang kulit buahnya bila difermentasi merupakan pakan ternak kaya protein.
- Kualitas tenaga kerja di Sulawesi lebih baik dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia yang lain (untuk sektor Pertanian dan Industri).
- Ketersediaan fasilitas juga infrastruktur. Sulawesi memiliki Balai Inseminasi Buatan dan Balai Besar Vertiner, serta Sulawesi masih dominant peranannya didalam memproduksi sapi potong, khususnya di wilayah timur Indonesia, selain itu Provinsi Sulawesi Selatan secara *geographic* (lokasi) memiliki peluang strategis untuk pengembangan industri. Disamping tersedianya sarana distribusi yang mampu diberdayakan untuk memasok daging beku ke pusat konsumsi di Jawa dan Sumatera, Sulawesi Selatan juga memiliki daya dukung lingkungan yang lebih baik untuk industri penyamakan, dan pengolahan daging, dibandingkan dengan Jawa.

Sapi Bali yang mendominasi budidaya ternak di Sulawesi, merupakan sapi potong yang unik, merupakan sapi asli Indonesia, sangat sesuai dengan *agro-ecological* dan kondisi sosial. Sapi Bali tahan terhadap penyakit tropis dan memiliki konversi yang baik dalam menghasilkan karkas (daging). Dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas, sapi Bali memiliki kesempatan dalam pemasaran semen beku, daging dan kulit baik untuk pasar domestik dan ekspor.

Usulan pengembangan

Upaya-upaya yang perlu untuk mencegah degradasi kualitas sapi Bali dan meningkatkan populasi serta mengembangkan usaha ternak sapi, maka:

- Perlunya fasilitasi dan pendanaan oleh Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam hal penyediaan bibit dasar (bibit elite/*foundation stock*) di sentra produksi agar dapat menghasilkan dan memperbanyak bibit induk (breeding stock).
- Juga lebih difokuskan pengembangan kerja sama dengan kelompok peternak terlatih yang ada (bukan petani yang sekedar ingin memelihara sapi) di sentra perbibitan rakyat (*Village Breeding Center*) yang telah terbentuk, untuk memelihara breeding stock agar dapat menghasilkan dan memperbanyak bibit sebar berkualitas (*commercial stock*) yang dapat dijual kepada para petani lain yang bermotif kuat memelihara sapi.

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

- ❑ Memanfaatkan kerjasama sinergi dengan Pemerintah Pusat melalui program FEATI dalam pemberdayaan petani peternak dalam peningkatan kapasitas teknologi dan manajemen budidaya serta pengembangan organisasi peternak dan agrobisnis. Adanya penyuluhan yang intensif agar para petani-peternak dapat mengikuti kaidah-kaidah *Good Farming Practicies*, *Good Breeding Practicies* dan *Good Feeding Practicies*.
- ❑ Penguatan Kelembagaan Peternak. Dengan penguatan kelembagaan, maka Peternak lebih mempunyai posisi tawar yang lebih baik terhadap "Blantik" maupun pedagang pengumpul, sehingga kegiatan dengan mengikuti kaidah *Good Farming Practicies* maupun *Good Feeding Practicie* ada manfaat langsung yang dirasakan.
- ❑ Mendorong sektor swasta untuk pengembangan industri olahan (daging, daging olahan, penyamakan kulit). Dan bersama Pemerintah Daerah mendorong perdagangan daging beku untuk pasar regional untuk meningkatkan nilai tambah rantai produksi. Disisi lain menciptakan pasar yang mampu memberikan insentif lebih baik untuk usaha pengembang biakan.
- ❑ Pemerintah Daerah, haruslah menyediakan infrastruktur/fasilitas umum untuk menunjang kegiatan pancapanen (*off farm*), seperti:
 - Pasar hewan yang representatif, dan
 - RPH di sentra Produksi. Dengan adanya RPH yang dikelola dengan profesional dan dikaitkan dengan kegiatan industri, maka produsen/peternak akan mempunyai peluang lebih baik didalam memasarkan produknya, serta
 - Tersedianya *cold storage* untuk menunjang kegiatan perdagangan daging yang di hasilkan dari RPH, serta peluang pertambahan nilai dari industri selanjutnya (daging olahan, daging kaleng, kulit dan lain lain).

Dengan memperhatikan langkah-langkah atau upaya-upaya strategis tersebut diatas maka di perlukan adanya:

1. Upaya Pemerintah yang lebih terkonsentrasi untuk rehabilitasi pembenihan Sapi Bali sebagai sapi potong jenis asli Indonesia, yang situasinya sudah kritis saat ini.
2. Mendorong pola perdagangan produk olahan antar pulau (daging beku) untuk menggantikan perdagangan ternak hidup dimasa depan.
3. Mengembangkan dan menetapkan lokasi sentra pembibitan sapi rakyat atau '*Breeding Centre*' yang sesuai dan potensial untuk Sapi Bali.

Jagung dan Pakan Ternak

Jagung merupakan salah satu komoditi strategis masa depan dilihat dari manfaatnya yang sudah bergeser tidak lagi sebagai komoditi pangan utama. Beberapa aspek yang membawa jagung menjadi komoditi strategis antara lain:



- Merupakan bahan baku utama pakan ternak. Perkembangan progresif dibidang peternakan dari ekstensif ke intensif untuk pemenuhan kebutuhan protein penduduk dunia yang terus meningkat. Ditahun 2008 kapasitas terpasang industri pakan ternak nasional saja sudah mencapai 12 juta ton, dengan pertumbuhan produksi rata rata 8% per tahun.
- Jagung secara tradisional masih merupakan sumber pangan pokok masyarakat di beberapa bagian Indonesia. Akan tetapi produk

derifatif industrinya semakin dibutuhkan untuk konsumsi seperti tepung, mie, serta berbagai minuman dan makanan ringan.

- Akhir akhir ini jagung merupakan bahan baku penghasil energi (etanol) yang telah dikembangkan besar-besaran untuk substitusi kelangkaan sumber energi fosil. Amerika Serikat sebagai penghasil jagung terbesar dunia telah mengurangi 30% lebih volume ekspor untuk kebutuhan etanol domestiknya. Dari konfigurasi pemanfaatan jagung dunia, 25% bagian dikonsumsi sebagai pangan dan benih, 62% sebagai bahan baku pakan dan 13% dijadikan energi.
- Kebutuhan akan jagung untuk industri di Indonesia, terutama makanan dan pakan ternak meningkat terus. Didominasi oleh pakan ternak yang menyerap 75% jagung untuk industri, *milling* menyerap 20%, industri minuman 2%, industri mie dan roti 1% dan industri makanan lain 2%.
- Secara regional, Indonesia termasuk eksportir jagung meskipun sekaligus juga mengimpor jagung terutama untuk kebutuhan industri dan saat luar musim panen. Produksi jagung saat ini terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan ekspor dan kebutuhan industri pakan ternak nasional.

Produksi jagung nasional terus meningkat dengan pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir rata rata 8,9% dan mencapai jumlah 13 juta ton pada tahun 2008. Produsen jagung terbesar di Indonesia adalah berturut turut; Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung dan Sumatra Utara. Sulawesi termasuk penghasil utama setelah Sumatra dan selanjutnya Nusa Tenggara. Pertumbuhan produksi jagung di Sulawesi termasuk yang tertinggi secara nasional. Jawa dan Sumatra utara juga mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, meskipun tidak sebesar Sulawesi, antara lain karena adanya perubahan konversi dari kebun tembakau. Sementara itu pertumbuhan produksi di Nusa Tenggara tidak menonjol karena jagung lebih banyak ditanam untuk konsumsi pangan.

Karena adanya pengurangan ekspor Amerika yang cukup besar kepasar dunia (dari 60 juta ton di 2007 menjadi 43 juta ton di 2008), banyak negara mengalami defisit pasokan jagung untuk kebutuhan Industrinya. Jepang masih butuh sekitar 10-15 juta ton per tahun, sementara Malaysia memerlukan 4 juta ton per tahun, belum termasuk Negara Asean lainnya. Melonjaknya ekspor jagung nasional disamping karena kebutuhan dunia yang meningkat juga tidak lepas dari usaha Gorontalo dalam memasarkan jagung Sulawesi ke Korea, Philipina dan Malaysia. Tingginya permintaan luar negeri mendorong Gorontalo menarik produksi jagung Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara untuk diekspor melalui Sulawesi. Indonesia sendiri masih menggantungkan kebutuhan jagung untuk industri pakan ternaknya. Sekitar 250-300 ribu ton masih diimpor pada tahun 2008, bahkan masih diatas 1,7 juta ton ditahun 2006. Volume impor Indonesia masih jauh lebih tinggi dari ekspor yang bergerak antara 50 ribu - 95 ribu ton per tahun dalam 5 tahun terakhir.

Benih unggul hibrida di Indonesia telah meliputi hampir 50% area tanam. Terutama di Jawa dan Sumatra yang produksinya langsung diserap oleh industri pakan ternak. Sulawesi sudah menggunakan benih hibrida di sebagian area tanamnya. Hanya Nusa Tenggara yang masih dominan menggunakan benih tradisional karena dibutuhkan untuk konsumsi. Meskipun benih unggul tersebut produktifitasnya lebih tinggi, tanaman ini membutuhkan air lebih banyak daripada jenis tradisional.

Produksi jagung Sulawesi tahun 2008 mencapai seluruhnya 2,5 juta ton. Produksi Sulawesi selatan (1,2 juta ton) adalah yang paling menonjol diantara propinsi Sulawesi lain disusul oleh Gorontalo (570 ribu ton) yang pertumbuhan produksinya cukup tinggi (30%), meskipun lahannya didominasi oleh sistim pegunungan dan perbukitan. Propinsi Sulawesi lain rata rata produksinya masih dibawah 500 ribu ton dengan pertumbuhan produksi yang bervariasi antara 10-18% per tahun.

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Intervensi Pemerintah Propinsi Gorontalo dalam perlindungan terhadap harga jagung ditingkat petani cukup efektif. Usaha inipun telah berhasil meningkatkan produktifitas jagung Gorontalo. Hambatan utama ekstensifitas produksi jagung di Gorontalo adalah kurang tersedianya lahan sehamparan yang relatif datar untuk perluasan budidaya jagung.

Kondisi rantai pasok komoditi primer jagung di Sulawesi masih belum cukup efisien, terutama karena nilai pasar pada tingkat petani terlalu rendah (40-50%) dibandingkan nilai eksportnya. Sebagian besar biaya diserap oleh jasa pengumpul dan pedagang yang memperhitungkan biaya transpor sebagai pengaruh dominan. Akan tetapi meskipun belum cukup efisien, dalam kondisi harga *farm-gate* yang rendahpun, petani masih menikmati harga global yang terus meningkat dan masih merupakan bisnis yang menarik dibandingkan komoditi pangan lainnya.

Kondisi Umum Industri Pakan Ternak

Konsumsi daging per kapita Indonesia (8-8,5 kg per tahun) relatif paling rendah dibandingkan negara negara di Asia Tenggara. Tapi dengan berkembangnya PDB, konsumsi per kapita akan terus meningkat terutama daging unggas yang mendominasi porsi konsumsi daging nasional. Pesatnya pertumbuhan konsumsi daging tersebut menuntut kebutuhan pasok untuk pakan ternak.

Meskipun dalam nomenklatur tanaman pangan Indonesia, jagung masih dianggap sebagai komoditi pangan utama setelah beras, kenyataannya dari seluruh produksi jagung nasional hanya 30% yang dikonsumsi sebagai pangan, sebagian besar (sekitar 55%) malah dijadikan bahan baku industri pakan ternak dan sisanya dijadikan bahan baku industri makanan, diekspor dan sebagai benih.

Komposisi pakan ternak cukup bervariasi tapi umumnya 50-60% dari bahan bakunya didominasi oleh jagung. Selain jagung bahan baku primer lainnya adalah; tepung ikan (yang potensial diproduksi di Sulawesi), bungkil kedelai, tepung tulang dan daging (MBM), dan Premix. Bahan tambahan primer tersebut seluruhnya masih diimpor.

Dalam perkembangannya, industri pakan ternak nasional secara akumulatif memiliki kapasitas terpasang sebesar 12 juta ton per tahun pada tahun 2008. Realisasi produksinya sendiri mencapai sekitar 8-8,2 juta ton per tahun atau 70% dari kapasitas ideal, menunjukkan tingkat kegiatan yang intensif. Sedangkan bahan baku utama jagung yang diserap untuk produksi tersebut diperhitungkan mencapai 4-5 juta ton per tahun. Produksi industri pakan ternak nasional seluruhnya diserap oleh kebutuhan dalam negeri yang tumbuh sekitar 4-6% per tahun, kecuali pada tahun 2006 saat berjangkitnya flu burung (1,5%), produksi tersebut masih belum mampu menutupi kebutuhan pakan nasional, yang sampai saat ini masih mengimpor pakan sekitar 70-80 ribu ton atau sekitar 9-10% dari kapasitas produksi pakan nasional.

Produksi pakan ternak nasional sebagian besar diserap oleh peternakan unggas (83%) dan selebihnya berturut-turut oleh budidaya perikanan (7%), peternakan babi (6%) dan ruminansia (3%) dan sisanya oleh usaha peternakan lain. Meskipun Indonesia telah mencapai swasembada unggas berikut produk turunannya telur dan produk olahan, sebagian sarana produksi budidaya unggas seperti bahan baku pakan, obat hewan dan teknologi lainnya masih tergantung impor. Begitu juga dengan pakan ternak, yang boleh dikatakan menyerap porsi biaya terbesar dalam budidaya unggas (70-80%).

Dari total 50 unit (2007) pabrik pakan ternak besar di Indonesia, jumlah terbesar berlokasi di Jawa Timur (15 unit), Banten (10 unit) dan Sumatra Utara (8 unit). Sulawesi diwakili oleh Sulawesi Selatan sebanyak 3 unit selebihnya tersebar di Lampung, DKI dan Propinsi Jawa lainnya.

Daya Saing Sulawesi

Sulawesi sudah menempati posisi yang terkemuka dalam produksi jagung nasional, pertumbuhannya cukup tinggi karena ketersediaan lahan dibandingkan Jawa. Pengembangan benih jagung unggul sudah mulai dikembangkan di Sulawesi.

Dalam pengembangan industri pakan ternak, Sulawesi terutama Sulawesi Selatan memiliki peluang dan keunggulan nasional dari 3 hal berikut:

- Tersedianya secara sinambung pasokan jagung sebagai bahan baku utama industri pakan ternak dari seluruh Sulawesi maupun Nusa Tenggara.
- Potensi berkembangnya produk tepung ikan di Sulawesi, sebagai penghasil produk perikanan terbesar se Indonesia. Meskipun porsinya tidak sebesar kebutuhan jagung, tapi tepung ikan merupakan bahan baku industri pakan yang terus menerus diimpor.
- Sulawesi Selatan memiliki jaringan pasok dan distribusi untuk produk-produk industri ke seluruh nusantara, juga memiliki cukup daya saing nasional dalam pengembangan industri dari SDM dan Infrastruktur.

Permasalahan Utama

Permasalahan dalam meningkatkan produksi jagung Sulawesi secara umum adalah:

- a. Lemahnya sistim pasok dan distribusi benih hibrida yang berkualitas, termasuk juga pupuk dan pertisida. Hal tersebut menciptakan harga tinggi dan ketersediaan yang tidak terjamin sepanjang waktu dan menghambat produktifitas petani.
- b. Terbatasnya kapasitas petani dalam teknologi dan manajemen budidaya jagung benih unggul. Umumnya disebabkan oleh lumpuhnya kegiatan penyuluhan di tingkat daerah, dan kurangnya kerjasama dengan lembaga penelitian yang ada.
- c. Tebatasnya luasan lahan kepemilikan *household*, sehingga usaha mekanisasi tidak efektif dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tingkat produktifitas yang relatif rendah.
- d. Akses petani ke permodalan, masalah klasik dari terbatasnya fasilitas yang diberikan lembaga keuangan mikro pada petani. Hal ini berhubungan pula dengan lemahnya organisasi petani dalam menjalankan bisnis budidaya jagung secara kolektif. Disamping itu belum ada upaya perbankan untuk menciptakan mekanisme mobilisasi permodalan mikro untuk kelompok tani berdasarkan kinerja produksi. Pola bantuan permodalan masih sangat mengacu pada asas kolateral.
- e. Kurangnya kemampuan petani untuk melakukan kegiatan pasca panen akibat terbatasnya fasilitasi Pemerintah Daerah (seperti pergudangan dan silo), juga karena lemahnya organisasi petani serta lumpuhnya kegiatan penyuluhan di daerah. Kondisi ini menyebabkan harga tingkat petani yang fluktuasinya tinggi dan bergerak pada nilai yang rendah. Petani selalu mengalami jatuhnya harga saat musim penghujan, sebaliknya tidak memiliki stok untuk memenuhi kuota saat berada diluar musim panen.
- f. Lemahnya informasi pasar petani serta jaringan bisnis dengan sektor swasta. Perlunya mensinergikan kerjasama dengan program Pusat yang dibiayai Bank Dunia yaitu FEATI, karena program ini berorientasi meningkatkan pemberdayaan petani melalui penyuluhan efektif seraya memanfaatkan kerjasama dengan Badan Riset dan Sektor Swasta.

Permasalahan dalam pengembangan Industri Pakan Ternak di Sulawesi antara lain:

- a. Terbatasnya pasokan bahan baku jagung yang kontinu serta kualitas sesuai kebutuhan industri (ukuran dan kekeringan). Pasokan bahan baku sering kali menipis saat diluar musim panen,

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

- karena petani tidak memiliki gudang yang memadai, sehingga industri harus mengimpor bahan baku jagung.
- b. Masih tingginya komponen bahan baku yang harus diimpor padahal bahan baku tersebut dapat diproduksi di Indonesia seperti:
 - Tepung ikan, padahal Sulawesi memiliki peluang mengembangkan industri tepung ikan dari tingginya produksi perikanan Sulawesi.
 - Bungkil kedelai, rendahnya produksi kedelai nasional mengakibatkan kebutuhan protein nabati harus diimpor dari luar.
 - c. Undang-Undang No.6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sangat sedikit mencantumkan pakan ternak sebagai bagian dari sistim peternakan sehingga aturan mengenai keberadaan industri pakan ternak dalam iklim perdagangan global tidak terakomodir.
 - d. Tingginya bea masuk jagung impor yang diterapkan pemerintah (5%) mempersulit industri pakan ternak, sementara produksi jagung Indonesia belum mencukupi pasokan kebutuhan industri pakan ternak nasional (meskipun sebagian diekpor). Kondisi ini secara tidak langsung akan mengganggu perkembangan sektor peternakan nasional.
 - e. Meskipun konstrain dari segi sumberdaya lingkungan jauh lebih baik dari Jawa untuk industri pakan ternak, hambatan Sulawesi yang menonjol adalah dalam infrastruktur terutama penyediaan tenaga listrik. Karena pengembangan kedepan Sulawesi lebih mengarah pada industri, dengan sendirinya perlu ada strategi jangka panjang pengembangan industri yang realistis di Sulawesi. Dengan strategi tersebut, dapat diproyeksikan kebutuhan energi Sulawesi dimasa depan.

Usulan Komprehensif Pengembangan Jagung dan Industri Pakan Ternak

- a. Perlunya kerjasama petani, penyuluh, balai riset yang difasilitasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan lebih intensif benih unggul hibrida untuk meningkatkan produktifitas dan mengangkat pendapatan petani. Upaya ini akan menyangkut sekaligus beberapa kegiatan:
 - Peningkatan efektifitas pelayanan penyuluhan di daerah yang berkesinambungan (tidak melekat pada program tertentu).
 - Meningkatkan akses petani ke permodalan (pengembangan Lembaga Keuangan Mikro yang kokoh dan berlangsung sinambung). Dalam hal ini diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk merumuskan mekanisme yang paling memadai bersama dengan Perbankan dan Asosiasi Petani.
 - Bantuan pengembangan infrastruktur seperti irigasi sederhana untuk budidaya benih jagung unggul, serta pengembangan daya listrik di masing-masing propinsi.
 - Peningkatan kapasitas pasca panen supaya kualitas produksi meningkat dan pasokan yang stabil baik untuk industri maupun ekspor. Untuk itu diperlukan bantuan Pemerintah dan penguatan kelembagan petani.
- b. Iklim investasi daerah yang menunjang untuk penanaman modal disektor industri (industri pakan ternak). Yang terpenting dalam mendorong minat investasi adalah:

Jaminan keamanan berbisnis jangka panjang dari pemerintah setempat. Artinya, karena sifat penanaman modal yang jangka panjang, investor membutuhkan aturan yang mantap, tidak berubah-ubah. Misalnya kepastian aturan dalam masalah ketenaga-kerjaan, kepastian dalam masalah perpajakan atau pungutan lain dan kepastian dalam aturan pertanahan.
- c. Rekomendasi untuk membangun pabrik pakan mini, yang kapasitasnya berkisar antara 3-5 ton per hari.

Jumlah seluruh ternak unggas di Sulawesi mencapai 7 juta unggas petelur dan 30 juta pedaging (broiler) pada tahun 2008. Kebutuhan pakannya diperkirakan mencapai 400 ribu ton per tahun. Padahal total kapasitas terpasang dari tiga industri pakan ternak di Sulawesi Selatan hanya mencapai 27 ribu ton per bulan atau 324 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut masih dibawah kebutuhan Sulawesi, sementara itu industri pakan di Sulawesi Selatan juga menyalurkan produknya untuk konsumsi pakan unggas Kalimantan Timur dan Selatan yang populasi unggasnya 4,5 juta petelur dan 47,5 juta broiler.

Melihat tingginya kebutuhan pakan ternak untuk Sulawesi dan Kalimantan, maka untuk memenuhi konsumsi internal Sulawesi saja masih diperlukan sekitar 100 ribu ton per tahun. Sehubungan dengan itu sekaligus untuk mengembangkan industri kecil, maka direkomendasikan pengembangan beberapa *Pabrik Pakan Mini* yang kapasitasnya masing masing berkisar antara 3-5 ton per hari. Investasi pabrik mini ini diperkirakan mencapai 300-500 juta per unitnya.

Lokasi yang dipilih adalah di daerah pantai dimana produksi tanaman pangan (jagung) cukup tinggi sehingga peluang nilai tambah dari produk olahan jagung bisa dicapai dan tepung ikan dapat dihasilkan dari limbah produksi perikanan atau tambak udang.

Kakao



Daya saing kakao Indonesia di pasaran global terutama terletak pada kapasitasnya dalam menghasilkan biji kakao untuk memenuhi jumlah permintaan yang besar. Meskipun tidak memiliki kualitas aroma rasa seperti kakao yang diproduksi Negara Afrika, kakao Indonesia mengandung lebih banyak lemak dan memiliki temperature leleh yang lebih tinggi. Itulah sebabnya merkipun harga dipasar dunia lebih rendah dibandingkan kakao Afrika,

kebutuhan dunia akan kakao Indonesia yang umum dipakai sebagai *'filler'* atau *'blender'* secara volume lebih besar dari kakao yang beraroma rasa.

Meskipun harga kakao Indonesia dipasar dunia lebih rendah, produksi optimumnya (1 – 1,2 ton per ha) lebih tinggi dari produktifitas kakao Pantai Gading maupun Ghana (sekitar 400 – 600 kg per ha). Dengan volume produksi sekitar 580.000 Mt tahun 2007, Indonesia masih menempatkan dirinya sebagai penghasil kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading (1.510.000 Mt) dan Ghana (680.000 Mt).

Secara umum pasar kakao dunia terbagi dalam 3 kutub:

- Pasar Amerika Utara yang didominasi oleh kebutuhan impor akan kakao yang kurang flavor, lebih banyak lemak tapi tinggi titik lelehnya dan digunakan sebagai blending atau filler.
- Pasar klasik Eropa Barat yang lebih membutuhkan kakao yang beraroma rasa dengan kualitas lebih tinggi, yang umumnya dipasok dari negara negara Afrika.
- Konsumer baru yang sedang berkembang, terutama Asia (antara lain China dan India) yang karakternya serupa dengan kakao yang diminati pasar Amerika Utara, aroma rasa yang kurang dan kualitas yang lebih rendah.

Sulawesi merupakan sentra kakao Nasional, dimana sebagian besar kakao Indonesia (63,8%) dihasilkan oleh mayoritas *smallholder* dari Sulawesi. Jumlah petani/*smallholder* Sulawesi yang terlibat dalam budidaya hulu kakao ini, mencapai sebanyak lebih dari 550.000 keluarga. Luasan kebun yang dikelola oleh masing masing keluarga, berkisar antara 0,5 sampai 1,5 hektar. Pada tahun 2007 ekspor biji kakao Sulawesi mencapai 132.300 ton sementara ekspor produk olahaannya 22.300 ton.

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Isu Perkembangan Kakao Nasional (Sulawesi)

Bantuan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas petani boleh dikatakan belum efektif, begitu juga halnya bantuan benih berkualitas, peralatan, pupuk serta bantuan lain untuk meningkatkan produktifitas. Sehingga meningkatnya produksi kakao Indonesia menjadi ketiga terbesar dunia boleh dikatakan upaya petani/*smallholder* semata-mata. Sedemikian sehingga saat kakao Sulawesi diserang hama CPB 15 tahun yang lalu, petani/*smallholder* tidak cukup berdaya mengatasinya, kecuali memperluas lahan tanam baru untuk mempertahankan jumlah produksi yang terancam turun. Hal tersebut telah mengakibatkan tingkat produktifitas yang semakin rendah (sekitar 700 kg per ha tahun 2007), karena produksi tidak lagi proporsional terhadap luas lahan.

CPB ini telah menurunkan juga kualitas produksi kakao nasional, ditambah lagi dengan adanya struktur pasar domestik yang tidak teroganisir, serta lemahnya pengawasan pemerintah disisi lain. Akibatnya produk ekspor biji kakao Indonesia dipasar internasional mengalami pemotongan harga karena kualitasnya yang tidak memenuhi standar permintaan, bahkan terus menurun sampai sekarang. Kondisi pasar domestik dan rantai suplai seperti ini, didorong juga oleh permintaan pasar yang kontinu terhadap murahnya harga kakao Indonesia yang selalu terkena potongan harga (detensi), mengakibatkan orientasi terhadap mutu tidak jalan. Pasar tidak memberikan insentif yang layak terhadap produk yang berkualitas baik, bahkan terhadap produk semi olahan (fermentasi).

Disamping itu situasi produksi *onfarm* dan situasi pasar serta rantai suplai yang ada telah mengakibatkan juga lumpuhnya daya saing industri pengolahan kakao Nasional. Tanpa tersedianya suplai kontinu biji kakao domestik yang berkualitas, industri pengolahan tidak dapat bersaing dengan bahan baku impor. Pengenaan pajak PPN dan pungutan lain juga telah mengurangi kapasitas saing industri dalam negeri.

Komoditi olahan industri yang menonjol dipasar dunia terdiri dari:

- Semi finished Cocoa product (*pasta, liquor, butter dan powder*), melalui 3 macam proses utama antara lain pemanggangan (*roasting*), penggilingan (*grinding*) dari biji yang sudah dipanggang dan *pressing* untuk menjadikan *butter* atau *powder*.
- Proses Industri menjadi *Industrial Chocolate*, merupakan bahan dasar untuk industri lebih lanjut coklat konsumsi atau makanan yang mengandung coklat.
- Proses Industri menjadi Industri coklat konsumsi, merupakan industri rantai akhir yang beragam jenisnya mulai coklat bermerk (*branding*), *confectionary*, minuman dan lain lain.

Dalam perkembangannya telah terjadi konsentrasi perusahaan perusahaan besar dalam penguasaan pasar untuk '*Semi Finish Products*' dan '*Industrial Chocolate*' akan tetapi sebaliknya penyebaran usaha terjadi pada Industri Coklat Konsumsi. Kondisi ini perlu diperhatikan karena pasar pasar utama boleh jadi sudah dikuasai beberapa perusahaan besar Internasional. Kecuali bila industri pengolahan yang independen lebih banyak menggarap pasar pasar yang masih berkembang (China dan India).

Malaysia menurun produksinya akibat lahan yang terbatas sampai sekitar 40.000 ton/tahun. Tapi dengan orientasi strategi industrinya, produk olahan kakao yang ada ditingkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari 300.000 ton/tahun pada 2004. Untuk itu hubungan saling menguntungkan dengan China juga dikembangkan, sehingga daya saing Malaysia dalam produk kakao primer maupun sekunder lebih baik posisinya daripada Indonesia saat ini.

Permasalahan Kakao

- Terbatasnya akses teknologi, akses permodalan (*microfinance*) dan lemahnya kapasitas manajemen serta organisasi petani kakao. Semuanya telah membatasi kapasitas petani dalam

menangani penyebaran CPB. Sementara itu perluasan lahan untuk mempertahankan produksi sudah tidak memungkinkan lagi, upaya intensif amat diperlukan.

- Lemahnya organisasi petani untuk mampu meningkatkan standar produksi, mengaktifkan jaringan bisnis petani dan mempermudah mendapatkan bantuan permodalan.
- Lumpuhnya kegiatan penyuluhan hampir di seluruh daerah karena keterbatasan dana dan belum dirasakannya sebagai suatu kebutuhan primer dalam RPJM di banyak daerah. Tanpa upaya pelayanan extension yang berkelanjutan, pemberdayaan petani tidak akan efektif.
- Kondisi pasar biji kakao saat ini dan rantai suplai domestiknya, yang lebih berorientasi pada jumlah daripada kualitas. Sehingga tidak memadainya insentif yang diberikan pasar pada petani/*smallholder* untuk produk yang berkualitas.
- Tidak adanya intervensi pemerintah untuk mengorganisir pasar lebih baik, sehingga mekanisme kontrol terhadap produk ekspor biji kakao yang memenuhi spesifikasi tidak berjalan; dan mengakibatkan pengenaan detensi (potongan harga) terus menerus.
- Tidak berkembangnya kegiatan pasca panen karena nilai tambah tidak terjadi secara memadai terhadap produk semi olah.
- Kurangnya koordinasi dan sinergi antar kegiatan pemerintah dalam program pengembangan kakao, misalnya antara Gerakan Kakao untuk meningkatkan produktifitas kakao dan proyek FEATI untuk pemberdayaan petani diprovinsi bersangkutan. Begitu juga manfaat yang dapat dikembangkan oleh program Pemerintah Pusat maupun Daerah dari keberhasilan proyek kakao yang dilaksanakan oleh lembaga asing seperti IFC dan USAID atau ACIAR.
- Lemahnya daya saing Industri pengolahan kakao (*liquor, pasta, butter* dan *powder*) karena beban biaya ekonomi tinggi, dan terbatasnya pasok domestik biji kakao maupun kakao fermentasi. Disamping itu perlu diperhatikan terjadinya kotalasi konsentrasi perusahaan Internasional besar untuk produk *grinding* dan produk kakao industri (*couverture*) dalam rantai pasok global yang otomatis menentukan kebutuhan pasar dunia untuk produk olahan tersebut. Konstelasi tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap industri di Indonesia apabila orientasi pasarnya lebih ke konsumen baru kakao (China and India).

Usulan Komprehensif Pengembangan Kakao

Dalam hal pengembangan budidaya kakao (On farm development)

a. Pemberdayaan Petani:

- Meningkatkan kapasitas petani dalam teknologi dan manajemen budidaya untuk menanggulangi CPB melalui rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi. Untuk itu perlu didayagunakan sinergi intensif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui program GERNAS KAKAO yang diimplementasikan di daerah sentra kakao bersangkutan. Begitu juga memanfaatkan kerjasama dengan program program Non Pemerintah, seperti program pemberdayaan dari USAID maupun IFC atau ACIAR.
- Membangun dan mengaktifkan peran organisasi petani sesuai kondisi sosio ekonomi lokal, untuk meningkatkan kemampuan bisnis, memperluas jaring pemasaran dan meningkatkan daya saing produksi. Untuk mendapatkan hasil yang berkesinambungan perlu kerjasama sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui program Bank Dunia, FEATI (*Farmer Empowerment through Agriculture Technology and Information*) yang dikembangkan di Sulawesi. Program ini dikembangkan untuk mengaktifkan layanan penyuluhan daerah yang berorientasi pada '*demand*' melalui interaksi antar petani, penyuluh, lembaga riset dan komuniti bisnis. Manfaat yang lestari

EXECUTIVE SUMMARY

Basic Study for JICA'S EIDP (Easten Indonesia Development Program) on Policies, Strategies, and Agricultural Development in Eastern Indonesia for Next RPJM

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

dari program ini hanya bisa diperoleh bila Pemerintah Daerah berhasil menempatkan kegiatan penyuluhan sebagai salah satu prioritas pembangunannya.

- b. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang lestari.
 - Mengikuti sertakan bank dan organisasi petani dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang sustainable, melalui kerjasama usaha yang dijamin Pemerintah Daerah. Diperlukan penelitian dan diskusi lebih dalam untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan, berdasarkan input stakeholder terkait.
 - Memasukkan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro ini sebagai bagian dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari Bank Pemerintah terkemuka.
 - Mengikuti sertakan pihak ketiga (Kolektor, Eksporter dan Industri) sebagai pihak penjamin dalam proses pelaksanaan Kredit Mikro Usaha dari Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjadikan kegiatan penyuluhan sebagai prioritas dalam pengembangan sektor pertanian daerah. Komitmen itu akan tercermin dalam RPJM dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- d. Reformasi rantai pasok dan distribusi dari sarana produksi seperti; pupuk, pestisida, benih bersertifikat untuk menghindari kelangkaan maupun lonjakan harga diluar kontrol, yang menghambat kegiatan produksi petani.
- e. Mengembangkan sistim database kakao yang menyangkut; lahan, produksi, sistim budidaya, kegiatan sentra produksi, ekspor dan transfer antar pulau, Industri pengolahan dan investasi dalam industri kakao serta sistim monitoring penyakit.

Dalam hal Reformasi Marketing Domestik serta rantai pasoknya.

- a. Sistim Perdagangan domestik yang terorganisir.
 - Diperlukan intervensi pemerintah, terutama difokuskan terhadap Kualitas biji kakao ekspor yang memenuhi persyaratan pasar serta masuk SNI dan perlindungan terhadap harga kakao di tingkat petani (*farm gate prices*).
 - Pemerintah perlu mendorong adanya komitmen dari seluruh pelaku perdagangan kakao (petani, pengumpul, pedagang dan eksportir) untuk merubah mekanisme perdagangan yang saat ini berorientasi jumlah/ volume kearah orientasi berdasarkan mutu. Semua ini semata mata untuk menjamin lestarnya produk kakao Indonesia secara internasional yang saat ini mulai terancam.
 - Bantuani Pemerintah Daerah dalam fasilitas paska panen seperti; pergudangan, sortir, pengeringan dan lain lain, untuk memenuhi standar mutu produksi yang memenuhi syarat, yang dapat dioperasikan oleh organisasi petani.
 - Mekanisme kontrol kualitas biji kakao. Bukan hanya kewajiban pemerintah, petani perlu juga ikut terlibat melestarikan kualitas biji kakao sejak tahap awal rantai pasok. Keikutsertaan petani dalam menjaga mutu kakao tergantung pada efektif dan sinambungnya kegiatan penyuluhan ditingkat daerah.
 - Pengembangan Dewan Kakao Nasional yang efektif ditingkat pusat dan provinsi unggulan. Kegiatan ditingkat pusat lebih berorientasi untuk memonitor dan mengontrol harga kakao nasional, termasuk mengembangkan perjanjian dagang bilateral maupun multilateral dengan negara konsumen untuk meningkatkan pamor kakao Indonesia di pasar Internasional. Ditingkat Provinsi lebih diorientasikan untuk meningkatkan dan menjaga mutu kakao ekspor bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Nasional, disamping mendorong berubahnya sistim pasar yang sekarang mengutamakan volume menjadi berbasis mutu. Disamping itu juga untuk menjamin harga ditingkat peteni yang lebih memadai.

c. Mendorong pengembangan Industri Pengolahan Kakao di dalam negeri.

- Berkembangnya pasar yang lebih berorientasi mutu, secara tidak langsung akan berkontribusi pula terhadap pasokan biji kakao berkualitas dan biji fermentasinya untuk bahan baku industri pengolahan.
- Perlunya pemerintah mempertimbangkan secara holistik beban pajak dan retribusi, demi meningkatkan daya saing produksi primer maupun sekunder (olahan) kakao nasional. Pendapatan negara tidak selamanya diperoleh langsung dari pajak dan retribusi, banyak cara lain untuk substitusi bila daya saing industrinya menonjol.
- Perlunya Sulawesi menyiapkan strategi pengembangan industri berbasis pertanian, dengan melihat daya saing nasional, kesiapan infrastruktur, kesiapan sistem pasok dan distribusi termasuk pelabuhan, sumber daya manusia untuk industri dan energi listrik..
- Perlunya pertimbangan mendalam dalam investasi industri pengolahan dengan memperhatikan kecenderungan berkonsentrasinya (*merger*) perusahaan besar kakao internasional terutama pada *market share grinding* (semi proses) dan 'Industrial kakao' (*couverture*). Kondisi tersebut akan sedikit banyak berpengaruh terhadap permintaan pasar dunia terutama dari negara konsumen utama.

Dengan kuatnya minat pengembangan industri pengolahan di Indonesia oleh afiliasi perusahaan multi nasional, iklim investasi yang menarik dan kompetitif akan menjadi ukuran berkembangnya industri pengolahan di Indonesia.

- Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kondisi infastruktur terutama jalan (kabupaten, provinsi) serta tenaga listrik, akan mendorong daya saing Sulawesi dalam meningkatkan industri pengolahannya dan sentra-sentra produksinya yang menonjol.

Dalam struktur pasar saat ini, kakao Indonesia dipengaruhi oleh kebutuhan global akan biji kakao yang lebih rendah kualitasnya dan murah harganya.